

**TINJAUAN YURIDIS POTENSI PENGENAAN
KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
TERKAIT KEWENANGAN DIREKSI BUMN
TERHADAP KETENTUAN YANG DIJIWAI DOKTRIN
*BUSINESS JUDGEMENT RULE***

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam (SDA) berlimpah. Mulai kekayaan di daratan sampai di lautannya, pertambangan, minyak dan gas, sampai kekayaan bawah laut yakni perikanan dan sebagainya. Potensi ini juga didukung sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tinggi kuantitasnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam (SDA) minyak dan gas diwujudkan dalam bentuk pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia disamping usaha swasta dan koperasi dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu Badan Usaha Milik Negara dibidang migas terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya adalah PT Pertamina. PT Pertamina (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai Pertamina merupakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan.

Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi), sekunder (jurnal-jurnal hukum, kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian), dan tersier (kamus hukum, media masa).

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya batasan mengenai kerugian keuangan negara tehadap kegagalan investasi dan batasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada direksi BUMN terkait doktrin *Business Judgement rule*

Kata kunci : Doktrin *Business Judgement Rule*, direksi, tindak pidana korupsi, PT Pertamina, BUMN.



OVERVIEW OF JURIDICAL POTENTIAL IMPOSITION OF CRIMINAL OFFENCE PROVISIONS RELATED TO THE AUTHORITY OF DIRECTORS OF BUMN ON THE TERMS OF THE DOCTRINE OF BUSINESS JUDGEMENT RULE

ABSTRACT

Indonesia is a country with abundant natural resources (SDA). Start the wealth on the mainland to the ocean, mining, oil and gas, to the underwater wealth of fisheries and so on. This potential is also supported by Indonesian human Resources (SDM) which is high in quantity. Article 33 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 essentially states that the earth and water and the natural wealth contained therein are controlled by the state and used to sebesar-besar the prosperity of the people. The country's mastery over natural resources (SDA) of oil and gas is realized in the form of policy making, management, arrangement, management and supervision. State-owned enterprises (SOES) is one of the perpetrators of economic activity in the Indonesian economy in addition to private and cooperative enterprises and has an important role in realizing the welfare of the community as mandated in article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution 1945. One of the state-owned enterprises in Indonesia's largest oil and gas in terms of revenue and its profit is PT Pertamina. PT Pertamina (Persero) hereinafter referred to as Pertamina is a business activity in the field of energy business implementation, namely oil and gas, new and renewable energy, and other activities related to or support business activities in the field of energy, namely oil and gas, new and renewable energy and the development of the optimization of resources owned by the company.

The method used is normative juridical method by basing on secondary data source consisting of primary legal material (Act No. 40 year 2007 about limited liability company, Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning state-owned enterprises and laws of the Republic of Indonesia number 20 year 2001 about the amendment to law Number 31 year 1999 on combating corruption crimes), secondary (legal journals , legal cases relating to the topic of research), and tertiary (legal dictionary, media of the time).

The results showed that there is a limitation on the financial loss of the country to the failure of investment and the limitation of criminal acts of corruption to the directors of the BUMN concerning the doctrine of Business Judgement rule

Key words: Doctrine of *Business Judgement Rule*, directors, corruption crime, PT Pertamina, Stated Owned Enterprises.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
PERSETUJUAN REVISI.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian.....	22

BAB II TUGAS POKOK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. Pemerintahan Indonesia.....	25
B. Kementerian di Indonesia.....	28
B.1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	30
B.2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).....	31
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	33
D. PT. Pertamina (Persero)	36
D.1 Sejarah PT Pertamina (Persero).....	36
D.2 Visi Misi PT Pertamina (Persero).....	38
D.3 Organ dalam PT. Pertamina (Persero).....	39

BAB III POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERKAIT

DENGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN

A. Tindak Pidana Korupsi	65
B. Keuangan Negara Dalam Hukum Pidana.....	84
C. Direksi BUMN	87
D. <i>Business Judgement Rule</i>	90

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGENAAN KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DIREKSI BUMN TERKAIT BUSINESS JUDGEMENT RULE

- A. Batasan konsep merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terhadap kegagalan investasi 93
- B. Batasan pengenaan tindak pidana korupsi yang terkait kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN terkait Doktrin Business Judgement Rule 100

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 113
- B. Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA 118

REVISI..... 142

CURRICULUM VITAE..... cxxii